



Kerukunan Hidup antar Umat Beragama dan Implikasinya pada Ketahanan Wilayah (Studi di Padukuhan Jatisari, Playen, Gunungkidul, DIY)

Azan Pranoto

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji tentang kerukunan hidup antar umat beragama dan implikasinya pada ketahanan wilayah (studi di Padukuhan Jatisari, Playen, Gunungkidul, DIY) dengan tujuan, yaitu: Menganalisis kerukunan hidup antar umat beragama dan mengkaji implikasinya terhadap ketahanan wilayah. Pelaksanaan Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan, yakni: 1) reduksi data, 2) display data, dan 3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama pada kategori semi semu karena interpretasi yang terbatas dan tertutup terhadap kerukunan sebagai suatu teks yang membicarakan fakta dan peraturan (bukan makna dan nilai) yang mengalami perkembangan sehingga mempengaruhi ketahanan wilayah yang masih dalam keadaan belum stabil, karena dialog antar umat beragama belum menjadi suatu pembahasan yang mana hal ini akan menentukan kerukunan itu sampai ke pengamalan masing-masing individu untuk mencegah potensi konflik kedepannya terutama faktor eksternal harus dikaji ulang dengan cermat.

Kata kunci: Kerukunan, Agama, Ketahanan Wilayah

Harmony of Life among Religious People and Implications for Regional Resilience (Study in Jatisari Padukuhan, Playen, Gunungkidul, DIY)

Azan Pranoto

Sekolah Tinggi Agama Islam Aceh Tamiang

ABSTRACT: This research focused on the harmony of interfaith religious life and its implications for regional resilience (A study in Jatisari, Playen, Gunungkidul, DIY). The purpose of this research are: to analyze the harmony of life among religious people and reviewing the implications in regional resilience. The research used descriptive qualitative method. The data collection technique is done by in-depth interviews and literature. Data analysis techniques used, namely: 1) data reduction, 2) data display, and 3) conclusion. The results showed that the harmony of life between religious in the semi-pseudo category is due to a limited and closed interpretation of harmony as a text that discusses facts and regulations (not meanings and values) that have developed so that it affects the resilience of the region which is still unstable, because dialogue between religious communities is not yet a discussion in which this will determine harmony until the practice of each individual to prevent potential conflicts, especially external factors, must be carefully reviewed.

Keywords: Harmony, Religion, Regional Resilience

Submitted:04-07-2022; Revised:13-07-2022; Accepted:24-07-2022

*Corresponding Author: azan.pranoto1611@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut “agama” (*religious*). Banyak dari apa yang disebut agama termasuk dalam superstruktur yang terdiri dari pesan-pesan bertipe simbol, citra, kepercayaan, dan nilai-nilai spesifik yang mana manusia menginterpretasikan eksistensi mereka. Akan tetapi, karena agama juga mengandung komponen ritual, maka sebagian agama tergolong juga dalam struktur sosial bahkan budaya suatu masyarakat. Berdasarkan pandangan itu, agama tidak hanya dipandang sebagai acara ritual bersifat rohani yang berurusan dengan kehidupan di dunia dan akhirat semata-mata, akan tetapi juga harus memasuki area struktur sosial dan budaya para pemeluk. Jadi, ada hubungan yang erat antara agama dengan struktur sosial dan budaya para pemeluk. Persoalan bersama yang sedang dihadapi yaitu mewujudkan ajaran agama ke dalam situasi sosial-budaya suatu masyarakat sehingga menjadikan peran agama lebih operasional. Paling tidak harus dikaitkan dengan tiga aspek penting: a). Dimensi internal umat beragama; b). Dimensi eksternal ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan (*ipoleksosbudkam*) yang memungkinkan aktualisasi nilai agama; c). Semua umat beragama mewujudkan nilai-nilai aktual sebagai bentuk kepedulian sosial dalam konteks masyarakat tertentu. (Wiyanti 2019)

Wacana tentang pluralitas agama dan masalah-masalah yang mengitarinya seperti buku-buku, tulisan media massa, acara seminar, kongres, simposium, diskusi, dialog seputar hubungan antar umat beragama semakin menguat dan muncul ke permukaan dalam berbagai tingkat, baik lokal, nasional, maupun internasional. Kecenderungan menguatnya perbincangan seputar pluralitas agama dan hubungan antar umat Beragama di antaranya pertama, ada kesenjangan yang jauh antara cita-cita ideal agama-agama dan realitas empirik kehidupan umat beragama di tengah masyarakat. Kedua, semakin menguatnya eksklusivisme dan intoleransi di sebagian umat beragama yang pada gilirannya memicu terjadinya konflik dan permusuhan yang berlabel agama. (Masturaini 2021)

Pluralitas dalam konteks kehidupan keagamaan tidak hanya ditandai oleh kehadiran berbagai agama yang secara eksistensial memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain akan tetapi juga ditandai oleh pluralitas internal masing-masing agama, baik berkenaan dengan aspek penafsiran maupun aspek pelembagaannya, keduanya saling terjalin satu sama lain. perlu digaris bawahi bahwa pluralitas agama berkaitan dengan masalah yang sangat peka, sebab berkaitan dengan keyakinan tentang sesuatu yang absolut benar, sesuatu yang menyangkut keselamatan hidup manusia setelah “kematian”. Keyakinan tersebut diejawantahkan dalam keberagaman, tidak hanya dalam wujud keyakinan teologi atau simbol ritual melainkan juga dalam wujud kegiatan yang secara langsung atau tidak bernuansa bahkan berdampak sosial. (Ishak 2019)

Permasalahan tentang umat beragama selalu mengalami perkembangan yang sangat dinamis dan bahkan sampai melakukan tindakan-tindakan intoleransi seperti penghentian kegiatan ibadah sampai penolakan keberadaan

tempat ibadah. Penolakan tempat ibadah sering dipicu oleh peraturan pemerintah setelah diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan pendirian rumah ibadah, regulasi negara berandil dalam aksi intoleransi terhadap kelompok minoritas di Yogyakarta. Peraturan PBM 2006 dijadikan landasan untuk melegalkan dominasi kelompok mayoritas. Lebih lanjut, ia mencontohkan pasal 14, menyebutkan bahwa syarat pendirian rumah ibadah sedikitnya 90 daftar nama pengguna rumah ibadah yang disahkan melalui KTP serta dukungan paling sedikit 60 warga yang disahkan oleh lurah dan kepala desa. Bagi kalangan tertentu hal ini tidak sulit dalam memenuhi persyaratan karena jumlah mereka memang banyak. Namun, peraturan ini dirasa sebagai bentuk diskriminasi bagi kelompok agama yang jumlah anggotanya lebih sedikit. Akan tetapi, hal itu juga tidak lantas menjamin kebebasan mereka dalam beribadah.

Rumah yang dijadikan tempat ibadah ini dipermasalahkan sebab dianggap tak mengantongi izin resmi. Hal inilah yang dikatakan Widya, "regulasi negara justru menjadi kekuatan politik yang mendukung intoleransi". Kegelisahan atas kondisi aktual tersebut, yang tengah dihadapi para penganut agama dan kepercayaan serta pengusung pentingnya kebebasan sipil di Indonesia, yakni terjadinya sejumlah peristiwa yang berdimensi kekerasan massa terhadap kelompok penganut agama dan kepercayaan maupun terkait dengan pembangunan rumah-rumah ibadah. Pengelolaan keberagaman umat beragama di tingkat daerah, dalam sosialisasinya adalah pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Namun yang mengemuka yakni berkaitan dengan komposisi jumlah umat beragama sebagai penentu jumlah anggota FKUB. Hal demikian juga yang terjadi di Gunungkidul. Setelah terbentuk, FKUB di Gunungkidul lebih banyak mensosialisasikan ketentuan pendirian rumah ibadah sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 s.d 16 PBM 2006 serta ketentuan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung sebagai tempat ibadah sebagaimana diatur dalam pasal 18 s.d 20 PBM. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan keberadaan tempat-tempat ibadah yang sudah ada sebelum berlakunya PBM 2006 dikaji lebih lanjut yang nantinya akan dikeluarkan surat rekomendasi kepada kepala daerah. Peristiwa penghentian kegiatan ibadah pada tahun 2014 di Padukuhan Jatisari, Kecamatan Playen, Gunungkidul terkait aturan PBM 2006 membuat beberapa pihak tertentu mempermasalahkan izin dari bangunan gereja tersebut. Hal ini sangat berpengaruh pada kerukunan hidup antar umat beragama di Gunungkidul karena acuan dari penolakan keberadaan tempat-tempat ibadah tersebut pada ketentuan yang diatur dalam PBM 2006. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan tujuan dari penelitian yakni; Pertama, menganalisis kerukunan hidup antar umat beragama; Kedua, mengkaji implikasi kerukunan hidup antar umat beragama terhadap ketahanan wilayah Padukuhan Jatisari, Playen, Gunungkidul. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif dengan penekanan pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang

diamati yaitu tentang kerukunan hidup antar umat beragama di masyarakat Padukuhan dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dengan analisis deksriptif, yang mana menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti mencoba mengeksplorasi data lapangan secara mendalam, menceritakan kembali dengan rinci sehingga data yang tersaji dapat dipahami dan dimengerti. Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mengungkap kerukunan hidup antar umat beragama yang berimplikasi pada ketahanan wilayah terutama di Padukuhan Jatisari. (Andini 2018)

Peneliti menggunakan beberapa teori yaitu; teori kerukunan, teori agama, dan teori ketahanan wilayah. Dalam literatur ilmu sosial kerukunan diartikan dengan istilah integrasi yang berarti: *the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomus units*. Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (=unsur/sub sistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal-balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan. Kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat, sebagai kondisi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial. Secara sosiologis, agama merupakan kategori sosial dan tindak empiris. Dalam konteks ini, agama dirumuskan dengan ditandai oleh tiga corak pengungkapan universal: pengungkapan teoritis berwujud kepercayaan (*belief system*), pengungkapan praktis sebagai sistem persembahan (*system of worship*), dan pengungkapan sosiologis sebagai sistem hubungan masyarakat (*system of social relation*) Sehingga pandangan teoritis, merupakan sistem yang mempunyai daya bentuk sangat kuat untuk membangun ikatan sosial religius masyarakat. Bahkan agama mampu membentuk kategori sosial yang terorganisasi sedemikian rupa atas dasar ikatan psiko-religius, dogma, atau tata nilai spiritual yang diyakini bersama. (M. Idris 2022)

Dalam pandangan Islam, keberagaman adalah fitrah (sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya) ini berarti manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan kebutuhan hidup manusia (Shihab, 2007:493). Memang manusia dapat menanggukannya sekian lama-boleh jadi sampai dengan menjelang kematiannya. Tetapi pada akhirnya, sebelum ruh meninggalkan jasad, ia akan merasakan kebutuhan itu. Memang, desakan pemenuhan kebutuhan bertingkat-tingkat. Demikian juga kebutuhan manusia terhadap agama dapat ditanggukkan, tetapi tidak untuk selamanya. Memahami ketahanan wilayah perlu dipahami terlebih dahulu konsep tentang ketahanan. Konsep ketahanan pertama kali digunakan oleh para ilmuwan fisika untuk menunjukkan karakteristik pegas dan menggambarkan stabilitas bahan dan ketahanannya terhadap guncangan eksternal. Pada tahun 1960an, seiring dengan perkembangan pemikiran sistem (*system thinking*), konsep ketahanan memasuki bidang lainnya, dan diinterpretasikan dengan makna yang berbeda

dengan konsep yang ada sebelumnya. Elemen penting lainnya dari definisi ketahanan adalah kapasitas kembali pulih seperti sediakala. Elemen ini dapat juga diartikan sebagai daya lenting, yang tentunya sangat berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, dan dari satu komunitas dengan komunitas lainnya. Strategi ketahanan (*resilience strategies*) terdiri dari sejumlah intervensi atau aksi yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan suatu wilayah, baik dalam tataran sistem, agen, dan institusi. Wilayah merupakan subsistem ketahanan nasional. Yang mana hal ini bagian dari faktor yang menentukan stabilitas dan dinamis ketahanan nasional, karena pada dasarnya dalam mewujudkan ketahanan nasional perlu menjaga ketahanan suatu wilayah yang tidak terlepas dari keterpaduan asta gatra yang dimiliki wilayah. Beberapa kalangan berupaya memperluas makna ketahanan. Menurut Habib terkait dengan ketahanan wilayah menyatakan bahwa: Konsepsi mengenai 'ketahanan' tidak lagi didominasi oleh pengertian yang bersifat militer, yakni yang menekankan aspek konflik antar Negara, khususnya yang berkaitan dengan aspek ancaman terhadap integritas wilayah nasional (konsep ketahanan territorial). Namun berakhirnya perang dingin telah memperkuat pemahaman konsep keamanan dari sudut pandang menyeluruh, yakni melalui konsep keamanan komprehensif (*comprehensive security*)". Ketahanan wilayah merupakan bagian yang terpenting dalam ketahanan nasional karena kondisi dinamik suatu tempat yang meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan akan memberikan sumbangan yang positif dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan baik dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, Ketahanan nasional berkaitan dengan wilayah yang berfungsi juga menopang ketahanan nasional. (Susanto 2022)

Penelitian lapangan ini didu(Susanto 2022)kung dengan sumber data yang peneliti gunakan yaitu data primer, merupakan data yang didapat langsung oleh peneliti dari hasil penelitian/wawancara lapangan dengan pedoman yang telah dibuat kemudian peneliti juga menggunakan data sekunder yakni mengambil dari literatur yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok pembahasan guna memperjelas, memperkuat, memperkaya data primer.

KAJIAN PUSTAKA

1. Teori Komunikasi Antar Pribadi (*Interpersonal Communication Theory*)

Komunikasi tatap muka disebut juga dengan komunikasi antarpribadi (*interpersonal*) yang berlangsung secara dialogis antara satu orang komunikator dengan satu atau dua orang komunikan. Menurut Joseph A. Devito komunikasi interpersonal mendefenisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan - pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. Selanjutnya Deddy Mulyana menyebutkan bahwa komunikasi interpersonal berarti komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi yang lain secara langsung baik secara verbal maupun non verbal. Ia menjelaskan bentuk khusus dari

komunikasi interpersonal adalah komunikasi diadik yang melibatkan dua orang.

Komunikasi demikian menunjukkan pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, mereka saling mengirim dan menerima pesan baik verbal maupun non verbal secara simultan dan spontan. Dari beberapa definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan komunikasi *verbal* dan non *verbal* antara dua orang atau sekelompok kecil orang secara langsung (tatap muka) disertai respon yang dapat segera diketahui (*instant feedback*).

2. Teori Komunikasi persuasif

Istilah "persuasif" atau dalam bahasa Inggris persuasion berasal dari kata Latin persuasio, yang secara harafiah berarti hal membujuk, hal mengajak, atau menyakinkan. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal adanya komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bersifat mempengaruhi audience atau komunikannya, sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator., komunikasi persuasive didefinisikan sebagai perilaku komunikasi yang mempunyai tujuan mengubah keyakinan, sikap atau perilaku individu atau kelompok lain melalui transmisi beberapa pesan. Sedangkan menurut R. Bostrom bahwa komunikasi persuasif adalah perilaku komunikasi yang bertujuan mengubah, memodifikasi atau membentuk respon (sikap atau perilaku) dari penerima. Komunikasi persuasif ini dapat dipergunakan dalam komunikasi penyuluh. Yang dikehendaki dalam komunikasi persuasif adalah perubahan perilaku, keyakinan, dan sikap yang lebih mantap seolah-olah perubahan tersebut bukan atas kehendak komunikator akan tetapi justru atas kehendak komunikan sendiri. Persuasi yaitu menggunakan informasi tentang situasi psikologis dan sosiologis serta kebudayaan dari komunikan, untuk mempengaruhinya, dan mencapai perwujudan dari apa yang diinginkan oleh message.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut yang berusaha untuk mengungkapkan fakta-fakta /fenomena-fenomena sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dikatakan demikian karena jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain *setting* yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat induktif, dan *meaning* (pemaknaan) tiap peristiwa adalah merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Di katakan fakta-fakta karena sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan peristiwa sosial, dengan cara mengungkapkan peristiwa-peristiwa faktual di lapangan dan mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi (*hidden value*), lebih peka terhadap informasi-informasi yang bersifat deskriptif dan berusaha mempertahankan keutuhan obyek yang diteliti. Pendekatan. Berdasarkan hal di atas pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis.

pendekatan deskriptif analitis bertujuan untuk melukiskan, memaparkan, menjabarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu atau kelompok masyarakat maupun organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang komprehensif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan informasi akurat yang lebih banyak dan menjalani wawancara secara langsung kepada responden. Alasan pemilihan metode ini karena dapat memperoleh jawaban yang cepat dan segera dengan pertimbangan adanya pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. (ST. Hardianti 2021)

HASIL

1. Profil Padukuhan Jatisari

Secara administrasi, Kecamatan Playen terbagi menjadi 13 Desa. Untuk mempermudah koordinasi, setiap desa terbagi menjadi beberapa dusun dan terbagi lagi menjadi beberapa rukun warga (RW) dan beberapa rukun tetangga (RT). Di Kecamatan Playen terdapat 101 dusun, 101 RW dan 605 RT pada tahun 2017. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), sebanyak 5 Desa di Kecamatan Playen termasuk kategori Desa Maju, sedangkan 8 Desa lainnya termasuk kategori Desa Berkembang, tidak ada desa di Kecamatan Playen yang termasuk kategori Desa Tertinggal. Lihat peta Kecamatan Playen di bawah ini:



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Padukuhan Jatisari merupakan salah satu padukuhan di Desa Playen Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. luas wilayah Padukuhan Jatisari 82,5 ha. Padukuhan Jatisari terletak di sebelah utara kantor Desa Playen dengan jarak 1 km. Wilayah padukuhan jatisari terletak pada ketinggian yang bervariasi antara 300-500 meter di atas permukaan laut. Lahan di padukuhan mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi. Curah hujan rata-rata sebesar 2,2 mm dengan jumlah hari hujan rata-rata 89 hari. Bulan basah 4-5 bulan, sedangkan bulan

kering berkisar antara 7-8 bulan. Musim hujan dimulai pada bulan oktober-november dan berakhir pada bulan mei-juni setiap tahunnya. Puncak curah hujan dicapai pada bulan desember-februari. Suhu udara untuk suhu harian 27°C, suhu minimum 25°C, dan suhu maksimum 33°C. Potensial untuk tanaman lahan kering (padi gogo dan palawija), tanaman buah-buahan (pisang, manga dll), budidaya perikanan perairan darat (kolam) serta untuk usaha budidaya ternak (penggemukan). Penggunaan lahan di padukuhan Jatisari mayoritas untuk pertanian berupa padi, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Jumlah penduduk di padukuhan 864 jiwa yang terbagi atas laki-laki 447 dan perempuan 417 (Susanto 2022)

Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai budaya dan ajaran agamanya, pemeluk agama di padukuhan ada tiga yaitu; Islam (829), Kristen (4) dan Katholik (31) seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Pemeluk Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	829
2	Kristen	4
3	Katholik	31
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Khonghucu	0
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME	0
	Jumlah	864

Sumber: Monograf Jatisari 2017

2. Keberadaan Umat Beragama

Penduduk desa Playen, 62,16% Beragama Islam sedangkan pemeluk agama Katholik 18,38% dan pemeluk agama Kristen berjumlah 8,54%. Selebihnya beragama Hindu, meskipun pemeluk agama Islam lebih banyak namun demikian adanya pengakuan akan keberadaan agama-agama yang lain di Desa Playen mendorong munculnya sikap saling menghormati dan menghargai di antara umat beragama. Hal senada juga diungkapkan oleh kasi pemerintah desa sebagaimana pernyataan berikut: "Pada dasarnya warga di desa mengenai keberadaan agama sudah ada sejak lama sehingga kehidupan umat beragama sangat sangat bagus bisa dilihat dari acara-acara, dalam acara

keagamaan itu tidak saling mempengaruhi tapi itu berdiri sendiri-sendiri dan yang jelas di Desa Playen itu ada *muhasabah* jadi *muhasabah* itu khusus agama Islam yang ada di Desa Playen di sembilan masjid itu setiap *selapanan* itu berkumpul dalam satu pengajian dan di situ da'i itu tidak tergantung satu tidak harus NU, atau Muhammadiyah nah itu masing-masing bergantian jadi kehidupan keagamaan di sini sangat harmonis karena di sini itu di wilayah timur sebagian besar itu penduduknya beragama Katholik kalau di belahan barat ini Islam dan sedikit sekali mengenai agama-agama lain tapi Hindu juga disini masih dan semua itu seperti yang saya katakan tadi harmonis kesadaran masyarakat desa terutama kelompok Islam tidak menekankan perbedaan internal karena jika *muhasabah* bisa dijalankan secara rutin akan bermanfaat baik yang akan di dapatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini juga meliputi hubungan seorang hamba (manusia) dengan Allah, maupun hubungan sesama makhluk ciptaan Allah seperti dalam kehidupan sosial yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kesadaran *muhasabah* ini akan lebih mengetahui bahwa pemahaman Agama membawa misi untuk menjalin hubungan antar sesama umat manusia (seagama atau berbeda agama) dan memiliki dimensi solidaritas yang dapat menjembatani berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan sosial-budaya, ekonomi, politik dan sebagainya dalam suatu komunitas dimana ia berada. Landasannya yaitu solidaritas dan toleransi inklusif. Solidaritas menyadari perlunya berhubungan baik dengan sesama manusia dan toleransi karena menyadari dalam menjalin hubungan itu ada perbedaan-perbedaan prinsip, keyakinan atau paham sebagai kebenaran mutlak yang dianut masing-masing orang.

Sebagaimana Pandangan pak dukuh menyatakan sebagai berikut: Masyarakat kami tidak ada permasalahan dalam menjalankan agama/keyakinannya karena itu dijalankan sesuai dengan tuntunan agamanya, walaupun pernah sempat terjadi kasus tapi itu bisa diselesaikan dengan cepat dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi kejadian itu Pandangan peneliti mengenai petikan wawancara di atas, perbedaan antar pemeluk agama tetap ada, namun tidak boleh menganggap sebagai satu-satunya pemeluk kebenaran. Karena kebenaran bukanlah milik yang selama ini mengklaim kebenaran akan tetapi kebenaran sesungguhnya milik dan bersumber dari Tuhan. Karena itu, semua pihak harus berbesar hati bila terdapat perbedaan pendapat dalam mengatasi masalah tertentu. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang mendasar tentang pentingnya mengimani, bahwa Tuhanlah sebagai sumber dan penentu kebenaran. Apa yang dilakukan oleh makhluk-Nya semata-mata sebagai *ijtihad*, olah pikir yang senantiasa mengandung kebenaran dan kesalahan. (NS 2021)

PEMBAHASAN

1. Syarat Kerukunan Umat Beragama

Pertama, kebebasan beragama bagian dari kehidupan sosial yang bisa menciptakan ribuan masalah, yang mesti dipecahkan dan ditanggulangi semua masalah itu, karena baik-buruk, sarana dan cara serta pemilihan alat-alatnya, saling berjaln kelindan dengan hal lainnya sehingga kebutuhan akan adanya

suatu teori umum, rencana yang menyeluruh, selaras, dan bertanggung jawab merupakan hak dan kewajiban bagi setiap orang. kami juga sadar gesekan agama itu sangat kuat, itu kalau tidak disikapi masing-masing itu tidak ada rasa yang masing-masing bertanggung jawab, karena kita saling *ngemong* dan kita orang pancasila sudah saling tau mana hak dan kewajiban masing-masing makanya disini kalau ada gesekan itu berarti kan ada sesuatu yang tidak pas. Nah kalau disini itu pas seperti yang disampaikan tadi *wong* disini ada 3 pondok pesantren dan kenyataannya juga bisa berjalan baik warga nahdliyin maupun muhammadiyah tidak pernah ada yang bentrok. *Selapan dino* itu kegiatan yang sudah rutin untuk berkumpul dengan da'i yang bergantian bahwa kegiatan masyarakat berorientasi melalui kearifan dengan sikap saling *ngemong* yang berlandaskan pancasila, memakai fleksibilitas Pancasila guna memperluas dan memperkokoh ruang-ruang kebebasan (*areas of freedom*) di mana kelompok-kelompok sosial lintas-etnis maupun lintas-keyakinan dapat berjumpa dan berdialog secara *genuine*.

Proses-proses perjumpaan dan dialog itu memungkinkan tumbuhnya saling percaya (*mutual trust*) maupun saling mengakui (*mutual recognition*) yang sangat penting guna menjaga kebhinnekaan Demokrasi secara filosofis mengimplikasikan adanya kebebasan warga negara untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang utuh, maka kebebasan untuk menentukan dan menemukan dirinya sendiri berdasarkan keyakinan nuraninya harus mendapatkan ruang dalam suatu negara yang menganut prinsip demokrasi. Akan tetapi, mengingat banyak perbuatan destruktif yang dilakukan atas nama agama, maka diperlukan peraturan yang dapat menertibkan persoalan hak kebebasan beragama. Untuk tujuan inilah kebebasan harus dilihat dari dua dimensi; dimensi internal dan dimensi eksternal. Kebebasan nurani (*liberty of conscience*) masuk dalam dimensi internal sedangkan kebebasan mengekspresikan ajaran agama, kebebasan membentuk asosiasi keagamaan serta kebebasan melembagakan ajaran agama masuk dalam dimensi eksternal. Jika dimensi internal sifatnya absolut, maka dimensi eksternal bersifat relatif, dalam arti bahwa hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan, hak melembagakan ajaran agama serta hak untuk membentuk asosiasi keagamaan terkait erat dengan institusi sosial lainnya seperti hukum dan politik.

Kedua, toleransi beragama bagian dari Prinsip kesetaraan dan persamaan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak pandang agama, etnis, status sosial dan ekonomi, jabatan dan lain-lain merupakan persamaan hak antar warga negara yang diakui UUD 45 Pasal 27 ayat (1) disebutkan: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebelum terbentuknya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (wksbm) kami syarkan di awal bahwa ini bukan hanya untuk orang muslim jadi non-muslim pun bisa menjadi anggota, pengurus, berkecimpung di dalamnya dan mendapatkan hak yang sama jika dipandang kurang mampu. Ya Alhamdulillah dari kepengurusan wksbm kami ada yang dari Islam, Kristen protestan, Kristen katolik, ya itu jadi bisa mempersatukan jadi tidak akan timbul *gap* antara agama A dan agama B.

keterlibatan kegiatan sosial yang ada di padukuhan tidak membedakan antar sesamaarganya masyarakatnya meskipun berbeda agama karena masing-masing mendapatkan hak yang sama baik itu sebagai pengurus ataupun yang akan mendapatkan bantuan karena kurang mampu. Sehingga kecemburuan sosial tidak terjadi hanya karena berbeda agama dan menjadikan rasa kebersamaan menjadi lebih kuat di antara sesama warga masyarakat padukuhan.

Dalam masyarakat padukuhan, proses pelebagaan nilai dan norma dapat ditemukan pada dua bentuk; pertama, semangat agama yang kemudian diadopsi sebagai spirit dalam hampir semua aktifitas sosial, politik bahkan ekonomi. Inilah yang disebut norma sosial yang melembaga (*institutionalize*). Peran kepala padukuhan sebagai salah satu agen utama yang membentuk kehidupan seimbang dan harmonis. Kedua, proses pelebagaan nilai dalam bentuk yang formal dan terorganisir dapat ditemukan pada aktifitas organisasi sosial (*civil society*) yang menjalankan fungsi pengendalian sosial. Lembaga sosial yang demikian itu telah hadir sejak dahulu, maupun yang baru dibentuk untuk menjaga dan mengawasi agar praktik-praktik sosial tetap berada dalam kerangka nilai dan norma lokal yang telah hidup dalam masyarakat. Lembaga sosial dimaksud yaitu wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.(Nisa et al. 2021)

2. Kualitas Kerukunan

Dalam konteks Padukuhan Jatisari, prinsip kerukunan yang terlihat ialah *agree in disagreement*. Hal ini disebabkan sudah selayaknya menyakini agama yang dipeluknya merupakan agama paling benar dan paling baik, sehingga muncul semangat untuk berusaha semua tingkah laku yang bersifat lahiriah sesuai dengan batiniah. Lebih lanjut dengan adanya pengakuan akan keberadaan agama lain di samping agama yang dipeluknya tersebut berarti diakui pula adanya persamaan di samping perbedaan yang ada. Pengakuan tersebut akan mendorong munculnya sikap saling menghormati dan menghargai di antara umat beragama

Pelaksanaan prinsip tersebut, menghendaki dua syarat yaitu: kebebasan beragama dan toleransi beragama. Kebebasan beragama sudah diberikan sedangkan toleransi beragama melalui pendekatan kultural yang melihat pada karakter sinkretik orang Jawa, mengadaptasi dan memadukan berbagai perbedaan dalam unsur agama. Karakter sinkretik pada Padukuhan ini pula yang memudahkan orang Jawa dengan latar belakang Hindu-Buddha yang kuat untuk begitu mudah dan toleran menerima kehadiran Islam atau Kristen. Tidak mengherankan jika proporsi mayoritas dari kelompok Islam tidak lantas memicu konflik dalam relasi antar pemeluk agama berbeda. Padukuhan ini sangat kuat sekali rasa kebersamaannya, bisa dilihat dari kegiatan syukuran/rasulan dimana itu merupakan kenduri bersama yang juga mendatangkan narasumber dari budayawan dan agamawan untuk memberikan makna dari acara ini dan juga mendoakan agar selalu terciptanya suasana damai di padukuhan ini. Tidak hanya itu termasuk juga pada saat idhul adha ketika Qurban siapa saja bisa berpartisipasi termasuk saya juga

sering ikut membantu memotong daging. Sikap toleransi orang Jawa sebagai sarana inkulturasi karena pada umumnya masyarakat Padukuhan Jatisari masih sangat kental dengan budaya Jawa, mulai dari tata cara, upacara, bahkan sampai *ewuh pekewuh* (mawas diri) dan *tepo seliro* (tenggang rasa) yang sangat menonjol di kalangan orang Jawa. Masyarakat padukuhan sudah siap dengan perbedaannya, meskipun mereka berbeda agama tapi tetap saling menghormati. Masyarakat padukuhan pada acara gotong-royong desa, tidak membedakan pemeluk agama, ketika itu ada gotong-royong membangun mushola, pemeluk agama lain juga ikut bekerja, dan membantu menyumbangkan semen. Namun, masih belum terlihat bagaimana hal sebaliknya yang mana umat beragama Islam membantu umat beragama lain Sehingga hubungan keagamaan di masyarakat padukuhan tidak hanya satu arah yang mana hanya umat Beragama lain yang membantu umat Beragama Islam. Kebersamaan masyarakat padukuhan hanya pada aspek sosial-budaya, akan tetapi kerukunan hidup antar umat beragama masih belum terlihat secara terbuka meskipun adanya konsesus dalam penyelesaian permasalahan terkait isu agama, karena masyarakat padukuhan selalu mengutamakan *tepo seliro* dan *ewuh pekewuh*, nilai inilah yang dijadikan modal kemampuan asimilasi dan adaptasi budaya yang luar biasa dalam kehidupan orang Jawa.

3. Implikasi Ketahanan Wilayah

Analisis ketahanan wilayah berada pada dimensi proses maupun implikasi. Dimensi proses mengulas ketangguhan dan keuletan masyarakat padukuhan dalam menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (Sunardi, 1997), sedangkan implikasi melihat ketangguhan dan keuletan kerukunan hidup antar umat beragama yang berdampak pada aspek ideologi, politik, sosial-budaya (Magis, 2010; Boyd dan Folke, 2012; Berkes dan Ross, 2013) serta keamanan. Analisis ketahanan wilayah juga melihat dampaknya pada dimensi sistem maupun agensi (Magis, 2010; Berkes dan Ross, 2013). Pada dimensi sistem merupakan jalinan antar ketahanan ideologi, politik, sosial-budaya, dan keamanan yang membentuk ketahanan pada seluruh wilayah sedangkan dimensi agensi merupakan ketahanan entitas masyarakat di dalam wilayah.

Dalam realitasnya ketahanan wilayah bisa terwujud dengan baik, apabila segenap lapisan masyarakat terlibat di dalamnya, sebab terwujudnya suatu ketahanan wilayah bukan hanya dibebankan pada lapisan masyarakat tertentu, walaupun disadari peran pemimpin sebagai motor terwujudnya ketahanan wilayah sangat besar. Situasi di padukuhan dalam mensikapi permasalahan bisa selesai karena adanya berbagai faktor yang mendukungnya. Pertama, musyawarah yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan dari tingkat padukuhan sampai ke pemerintah kabupaten serta pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat. Kedua, adanya konsesus secara tertutup antar kedua belah pihak di mana orang yang memperlakukan izin gereja melakukan permintaan maaf. Ketiga, kesadaran dan inisiatif dibangun secara kultur sehingga memiliki makna dan kekuatan dari dalam untuk merawat keragaman, terutama agama dan budaya yang mengikat mereka dalam keseimbangan. Agama dalam konteks sosial tidak hanya menuntut kepatuhan

belaka Akan tetapi juga pergulatan untuk mewujudkan tatanan yang lebih bertanggungjawab. Hanya dengan perspektif inilah manusia dapat memahami pesan-pesan suci agama yang relevan dengan keadilan sosial, persamaan derajat, demokrasi, egalitarian dan semacamnya. Dasar semua ini adalah konsep takwa, yang memulangkan seluruh sumber kebenaran dan harkat kemanusiaan di tangan tuhan, bukan berada dalam otoritas manusia. (Mukzizatin 2020)

4. Aspek Ideologi

Kerukunan antar umat beragama sangat berpengaruh pada aspek ideologi suatu negara, dengan tidak terlaksananya kerukunan antar umat beragama maka akan terjadi gejolak dari masyarakat yang tidak puas atas perlindungan terhadap hak warga negara yang telah diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk mengatur bangsa dan negara. Negara dapat disalahkan atas tindakannya dan bisa berimbas pada kerusuhan. Ketahanan dari suatu wilayah sangat dibutuhkan guna menjaga kekuatan ideologi yang dianut oleh Negara Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila hendaknya dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari dasar Negara. Pada konteks Padukuhan Jatisari Pelaksanaan secara objektifnya mengikuti peraturan Undang-Undang dan Peraturan Bersama Menteri sedangkan Pelaksanaan secara subjektifnya Peraturan Daerah yang kemudian memberikan izin bangunan yang sudah diselesaikan administrasinya dengan mengikuti aturan sebelum diterbitkannya PBM 2006 yang kemudian izin bangunan diperbarui dengan aturan PBM 2006.

Musyawah yang rutin dilaksanakan dalam bertukar pendapat dan juga sebagai tempat silaturahmi di padukuhan karena semua pembahasan pada forum ini sehingga memunculkan rasa kebersamaan dan persatuan bagi masyarakat, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Rasa kebersamaan yang dibangun melalui perkumpulan itu bisa meleburkan berbagai identitas dan golongan diantara masyarakat termasuk juga agama akan tetapi dialog antar umat beragama belum menjadi suatu pembahasan yang sering karena setiap pertemuan penekanannya lebih kepada bahwa Padukuhan Jatisari guyub rukun karena inilah yang akan menentukan kerukunan itu sampai ke pengamalan masing-masing individu dari setiap masyarakat. Secara ideologi tidak tampak sebagai suatu permasalahan karena masih ada pemahaman ideologi secara bersama namun akan menjadi tantangan baru di masa yang akan datang karena pemahaman terhadap ideologi bersama akan berubah seiring dengan perkembangan yang ada di Padukuhan.

5. Aspek Politik

Kondisi stabilitas politik menjadi salah satu faktor hadirnya kebijakan yang sesuai dengan kehendak masyarakat, kondisi politik yang sehat dapat dilihat dari keselarasan hubungan antara pemerintah sebagai pemangku kekuasaan dengan masyarakat sebagai pemberi kepercayaan. Dalam mewujudkan ketahanan nasional suatu negara maka dibutuhkan ketahanan politik, mengingat politik menjadi aspek terpenting yang menentukan pihak mana yang akan berkuasa, bagaimana *input* yang dihasilkan, dan seberapa

efektif hasil yang didapatkan. Perbedaan apapun yang disikapi dengan dewasa termasuk pandangan politik akan menjamin wilayah menjadi kondusif, Karena perbedaan politik bisa membuat situasi menjadi tidak aman. Masyarakat padukuhan menyikapi perbedaan itu dengan rasa tanggung jawab sehingga tidak berpengaruh pada budaya yang selalu bergotong-royong dan tidak lagi mempermasalahkan perbedaan pandangan politiknya, bahkan untuk memilih ketua RT tidak ada permasalahan meskipun berbeda agama karena anggapan masyarakat yang menjadi pemimpin itu harus bisa mengayomi dan baik secara perilaku sosialnya.

6. Aspek Sosial-Budaya

Aspek sosial budaya masyarakat padukuhan memiliki rasa sosial yang tinggi untuk bersedekah, hal ini sangat baik karena kepedulian itu menjadi berimbang dan selaras dengan rasa tanggung jawab bersama tidak hanya dipikirkan oleh perangkat padukuhan saja tetapi keterlibatan masyarakat sangat membantu. Masyarakat padukuhan tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah baik itu pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan pusat. Walaupun pemerintah kemarin ada program raskin tidak menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena adanya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (wksbm). Kaitannya dengan budaya jawa berjalan beriringan ketika ada acara kesenian seperti ketoprak, wayang kulit, akan bersamaan pula acara santunan sehingga tidak meninggalkan budaya jawa.'

7. Aspek Keamanan

Keamanan wilayah merupakan kondisi dari suatu wilayah yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kondisi yang kondusif tanpa adanya gejolak sehingga masyarakat hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan dan ancaman. Keamanan wilayah dapat diwujudkan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah termasuk kekuatan masyarakat untuk menghadapi ancaman dan hambatan yang hadir sehingga tidak sampai mengganggu stabilitas kondisi suatu wilayah. Sebagaimana pernyataan dari babinsa Dari sisi keamanan kondusif dan saling berkoordinasi langsung dengan pihak desa termasuk pembinaan secara internal yang menjalankan komunikasi dengan Karang Taruna dan sebagainya. komunikasi antara Babinsa dengan pengurus Karang Taruna dilakukan secara formal yang ditunjang oleh pola komunikasi non formal. Sebab bila penekannya hanya pada pola komunikasi formal saja akan terasa kaku, demikian halnya apabila komunikasi non-formal saja yang dikedepankan maka akan mengesankan tidak serius bagi pengurus Karang Taruna maupun masyarakat secara keseluruhan. Dari babinsa sendiri menggunakan gabungan dari kedua pola komunikasi tersebut. Kegiatan lainnya yang dilakukan memetakan wilayah yang rawan konflik, pencurian dan bencana alam. efektifitas komunikasi sangat membantu kepedulian masyarakat untuk ikut peran serta berpartisipasi terhadap lingkungannya secara tidak langsung akan cepat membantu terwujudnya stabilitas keamanan wilayah. Mewujudkan adanya peran aktif masyarakat dan

keikutsertaannya dalam tanggung jawab di bidang keamanan akan dapat membantu babinsa dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam rangka menyikapi permasalahan yang muncul di wilayah binaan pada era reformasi pembina teritorial pada hakikatnya mengukur potensi wilayah geografi, demografi dan kondisi sosial agar terciptanya suatu kekuatan kewilayahan sebagai ruang alat dan kondisi juang yang tangguh dalam mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara serta jalannya pembangunan nasional. Era reformasi sekarang ini, kemampuan Babinsa sangat menentukan keberhasilan pembinaan teritorial sehingga di dalam melaksanakan tugasnya Babinsa selalu berkoordinasi dengan aparat terkait di Desa/Kelurahan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda agar tidak terjadi kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan tugasnya. Di dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Babinsa sering disibukkan dengan berbagai macam masalah yang menyangkut sosial (kemasyarakatan) di antara kegelisahan, bahkan tantangan berasal dari hubungan antar umat beragama yang masih mengedepankan nurani dan akal sehat karena fakta tentang konflik dan kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan mengatasnamakan agama, bahkan atas nama membela agama. (Sari 2012)

Hal inilah yang menjadi potensi konflik kedepannya karena berdasarkan pengalaman dari peristiwa yang pernah terjadi di Padukuhan Jatisari meskipun bisa diselesaikan, akan tetapi faktor eksternal harus dibaca ulang dengan cermat untuk mencegah konflik yang bernuansa agama sehingga koordinasi babinsa selain juga dengan para masyarakat setempat juga memerlukan koordinasi dengan para pemuka agama dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan wilayah.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Kerukunan hidup antar umat Beragama di Padukuhan Jatisari masih pada kategori semi semu karena: Pertama, interpretasi yang terbatas dan tertutup terhadap kerukunan sebagai suatu teks yang membicarakan fakta dan peraturan (bukan makna dan nilai) yang mengalami perkembangan. Kedua, belum terlihatnya interaksi timbal-balik antara umat Islam ke umat beragama lain. Kerukunan hidup antar umat beragama berimplikasi terhadap ketahanan wilayah yang masih dalam keadaan belum stabil, karena pada aspek ideologi Rasa kerbersamaan yang dibangun melalui perkumpulan meleburkan berbagai identitas dan golongan akan tetapi dialog antar umat beragama belum menjadi suatu pembahasan yang sering karena inilah yang akan menentukan kerukunan itu sampai ke pengamalan masing-masing individu untuk mencegah potensi konflik kedepannya karena berdasarkan pengalaman dari peristiwa yang pernah terjadi di Padukuhan Jatisari meskipun bisa diselesaikan, akan tetapi faktor eksternal harus dibaca ulang dengan cermat.

PENELITIAN LANJUTAN

Sebagai seorang akademisi, penulis memohon kepada rekan-rekan calon penulis lainnya untuk selalu mengembangkan sumber daya manusia guna membangun negeri dengan terus memberikan karya-karya terbaik kepada bangsa dan negara dengan artikel dengan disiplin hukum pidana Islam

UCAPAN TERIMAKASI

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dari dekat maupun jauh, dan mendukung hingga hasil naskah ini dapat selesai, khususnya kepada ketua STAI Aceh Tamiang, ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Civitas Akademik yang secara penuh memberi dorongan dan kepercayaan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis meyakini bahwa dengan bimbingan dan petunjuk para tokoh tersebut menjadikan penulis untuk terus berinovasi dan berkreasi memberikan karya-karya kepada bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, Agus Putri. 2018. "Bentuk Komunikasi Sosial Masyarakat Muskim Dan Non Muslim Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Desa Huta Padang Kec. Bandar Pasir Mandoge Kab. Asahan." *Sripsi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Sumatera Utara*.
- St. Hardianti. 2021. "Peran Tokoh Agama Dalam Penanaman Sikap Moderasi Beragama Pasa General Millennial Di Borong Kepala Kab. Bantaeng." 1-86.
- Ishak, M. S. B. 2019. "Kerukunan Antar Umat Beragama Di Pulau Pinang (Studi Kasus Di Seberang Perai Tengah)." *Skripsi*.
- M. Idris, Wahyu Ziaulhaq. 2022. "Model Komunikasi Penyuluh Agama Islam Dalam Memperkokoh Kualitas Pengetahuan Pemuda Yang Majemuk Melalui Pendekatan Humanis Di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat." 1(1):16-22.
- Masturaini. 2021. "Penanaman Nilai Nilai Moderasi Beragama Di Pondok Pesantren (Studi Pondok Pesantren Shohifatushofa Nw Rawamangun Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)." *Pascasarjana Iain Palopo* (April):5-24.
- Mukzizatin, Siti. 2020. "Kompetensi Penyuluh Agama Islam Dalam Memelihara Harmoni Kerukunan Umat Beragama Di Jakarta Selatan." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 8(1):458-75. Doi: 10.36052/Andragogi.V8i1.113.
- Nisa, Muria Khusnun, Ahmad Yani, Andika Andika, Eka Mulyo Yunus, And Yusuf Rahman. 2021. "Moderasi Beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama Dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital." *Jurnal*

Riset Agama 1(3):79-96. Doi: 10.15575/Jra.V1i3.15100.

- Ns, Habibur Rohman. 2021. "Upaya Membentuk Sikap Moderasi Beragama Mahasiswa Di Upt Ma'had Al-Jami'ah Uin Raden Intan Lampung." *Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Raden Intan Lampung* 13.
- Sari, Anjeli Aliya Purnama. 2012. "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Pendidikan Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Agama Islam."
- Susanto, Agus. 2022. "Eran Penyuluh Agama Islam Dalam Membangun Moderasi Beragama Berbasis Literasi Di Era Media Baru 5.0 Di Kabupaten Majalengka The." 9(1):47-56.
- Wiyanti, Retno. 2019. "Kerukunan Antarumat Beragama Di Desa Gebangsari Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Skripsi." Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.